

## Evaluasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir

\* Wisnu Yudhistira<sup>1</sup>, Andriyus<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

<sup>2</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

\*Corresponding Author : wisnuyudhistira@student.uir.ac.id

### Abstrak

Kurang berfungsinya BPD di desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning dalam menjalankan tupoksinya terutama dalam menampung aspirasi masyarakat. Karena fungsi BPD adalah untuk membuat kebijakan, anggaran serta menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan untuk kepentingan masyarakat. Tujuan penelitian ini ialah Untuk mengetahui Untuk mengevaluasi fungsi Badan Permusyawaratan dan hambatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis serta menggunakan teori Evaluasi dari William N Dunn. Hasil penelitiannya adalah sebagai evaluasi yang harus dilakukan ialah dalam menentukan tema rapat ini ialah harus dilakukan beberapa musyawarah lain yang bertujuan untuk mendapatkan aspirasi masyarakat seperti contohnya tentang Peraturan Desa yang dibutuhkan agar kehidupan masyarakat desa lebih aman dan nyaman serta terciptanya lingkungan yang sehat. Hal-hal yang dikemukakan masyarakat tentunya merupakan sebuah bentuk keinginan harapan serta apa yang di perlukan oleh masyarakat desa maka dengan demikian jika aspirasi tertampung dengan baik maka sudah dapat dipastikan bahwa aspirasi tersebut memang membangun kesejahteraan masyarakat. Kurangnya wadah atau tempat untuk menampung aspirasi masyarakat, kurangnya inovasi yang dilakukan BPD dalam menjemput aspirasi Masyarakat; Kurangnya dana untuk melaksanakan musyawarah, kurangnya partisipasi masyarakat untuk turut hadir dalam musyawarah yang dilaksanakan; Kurangnya minat masyarakat untuk memberikan pendapat dalam musyawarah sehingga mengakibatkan aspirasi tidak tersalurkan dengan baik; Serta banyaknya keinginan masyarakat yang belum bisa diwujudkan karena terkendala waktu dan biaya tersebut.

**Kata kunci:** Aspirasi, BPD, Desa, Masyarakat

### Abstract

The BPD in Batu Ampar Village, Kemuning District, is not functioning properly in carrying out its duties, especially in accommodating community aspirations. Because the function of the BPD is to make policies, budgets, accommodate community aspirations and carry out supervision for the benefit of the community. The purpose of this study is to determine the function of the Consultative Body and the obstacles of the Village Consultative Body (BPD) in Accommodating and Channeling Community Aspirations in Batu Ampar Village, Kemuning District, Indragiri Hilir Regency. The study used a qualitative method with a descriptive analytical research nature and used the Evaluation theory from William N Dunn. The results of the study are as an evaluation that must be done is in determining the theme of this meeting is to hold several other deliberations that aim to obtain community aspirations such as for example about Village Regulations that are needed so that the lives of village communities are safer and more comfortable and create a healthy environment. The things put forward by the community are of course a form of desire, hope and what is needed by the village community, so that if the aspirations are accommodated properly, it can be ascertained that these aspirations do build community welfare. lack of a container or place to accommodate community aspirations, lack of innovation carried out by the BPD in picking up community aspirations; lack of funds to carry out deliberations, lack of community participation to attend the deliberations that are carried out; lack of community interest in providing opinions in deliberations so that aspirations are not channeled properly; as well as the many desires of the community that have not been able to be realized because they are constrained by time and costs.

**Keywords:** Aspirations, BPD, Village, Community

## PENDAHULUAN

Dalam menjalankan fungsi dan tugas kepala desa dibantu oleh sekretaris desa. Sekretaris Desa merupakan bagian dari perangkat desa yang menjadi bagian penting dari sistem pemerintahan desa. Selain sekretaris desa pemerintahan desa juga dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan desa merupakan badan yang dibentuk di desa terdiri dari pemuka masyarakat di desa yang memiliki fungsi untuk membuat peraturan desa, mendengar, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa (Trisantoro, 2011:43).

Ketentuan tentang BPD diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 menyebutkan bahwa BPD memiliki fungsi antara lain sebagai berikut :

- 1 Membahas dan menyampaikan rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- 2 Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
- 3 Melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa;

Selanjutnya dalam pasal 31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 BPD mempunyai fungsi untuk :

- 1 Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- 2 menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- 3 Melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa;

Selain itu dalam pasal 51 31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 BPD juga menjelaskan tentang hak yang dimiliki oleh anggota BPD antara lain sebagai berikut :

- 1 Mengawasi dan meminta keterangan tentang pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa;
- 2 menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- 3 Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dalam belanja desa;

Dalam aturan itu juga dikatakan bahwa apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan maka BPD berkewajiban untuk meningkatkan dan menindak lanjuti pelanggaran yang disebutkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Serta selain itu BPD juga memiliki hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan peraturan desa.

Tidak hanya itu untuk melancarkan rencana kerja BPD mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik di Desa melalui pengawasan oleh BPD dapat dilaksanakan maka perlu dijabarkan ke dalam program-program kerja yang dilakukan oleh BPD antara lain sebagai berikut :

- 1 Menampung, menyalurkan serta mengawal aspirasi masyarakat desa;
- 2 Menyusun dan membahas peraturan desa;
- 3 Menciptakan Keadaan kondusif dan hubungan kerja yang harmonis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 4 Melaksanakan tugas BPD dalam pemilihan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
- 5 Program-Program kerja BPD lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya

Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh BPD antara lain adalah sebagai berikut :

- 1 Mengadakan Pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi masyarakat secara lisan dan tertulis;
- 2 Mengadakan musyawarah BPD dengan pemerintahan desa untuk menyampaikan atau menyalurkan aspirasi masyarakat;
- 3 Menyusun dan menyampikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada kepaladesa untuk dialokasikan dalam rancangan anggaran pendapatan belanja desa.

Begitupun dengan yang terjadi di Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir. Desa Batu Ampar merupakan desa berkembang yang tentu saja memiliki banyak keperluan fasilitas umum bagi semua masyarakat maka dengan demikian pemerintah desa bersama BPD diharuskan untuk membuat rancangan pembangunan yang baik. Rancangan pembangunan yang baik harus dilakukan dengan melakukan musyawarah dengar pendapat dengan masyarakat. Tidak hanya persoalan pembangunan tujuan pembentukan pemerintahan Desa tentu saja untuk membuat masyarakat hidup aman dan sejahtera maka kesejahteraan tersebut merupakan tanggung jawab pemerintahan desa.

Untuk menciptakan pemerintah desa yang baik tentu saja selalu mendengarkan menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Tugas untuk mendengar dan menyampaikan aspirasi masyarakat merupakan tugas dari BPD. Jika dilihat dari catatan aspirasi masyarakat masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan jangka waktu yang sudah berjalan hampir 6 bulan.

Jadi dengan demikian di Desa kemuning jarang sekali di adakan rapat dengar pendapat dengan masyarakat bahkan masyarakat tidak mengenal BPD yang bertugas di desa mereka adapun beberapa fenomena yang terjadi di Desa Batu Ampar adalah sebagai berikut :

- 1 Kurang berfungsinya BPD di desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning dalam menjalankan tupoksinya terutama dalam menampung aspirasi masyarakat. Karena fungsi BPD adalah untuk membuat kebijakan, anggaran serta menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan untuk kepentingan masyarakat.
- 2 Kurang komunikasi BPD di desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning dengan aparat desa dan masyarakat, sehingga menghambat BPD dalam menjalankan fungsinya. Karena dengan kurangnya komunikasi tentu saja pertemuan untuk pembahasan-pembahasan Desa juga kurang, sehingga menjadikan hal tersebut lambat dipecahkan.
- 3 Masyarakat tidak mengetahui tugas dan fungsi BPD di desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning bahkan masyarakat tidak mengenali anggota BPD di desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning.

## **METODE PENELITIAN**

Serta jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif yang mana melakukan penelitian ini akan melakukan pengamatan terhadap fenomena yang terjadi dilapangan atau kejadian langsung yang dialami oleh subjek penelitian. Hal yang nantinya akan diamati seperti Perbuatan, Perilaku dan juga Pandangan dari subjek penelitian kemudian nantinya akan dilakukan perbandingan terhadap fenomena tersebut dengan bahasa, teori atau konteks keilmuan yang telah ada sebelumnya. Penelitian kualitatif ini akan memfokuskan pada analisa fakta dan fenomena dibandingkan dengan grafik dalam bentuk angka atau persentasi dalam bentuk penilaian (Moleong, 2011:6).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penyerapan aspirasi masyarakat ada dua yaitu penyerapan aspirasi masyarakat oleh pemerintahan dan penyerapan aspirasi masyarakat oleh BPD. Penyerapan aspirasi masyarakat oleh pemerintah melalui proses perencanaan pembangunan dan penyerapan aspirasi masyarakat oleh BPD ada dua tahap yaitu secara langsung dan tidak langsung (Dwiyanto, dkk 2003). Aspirasi adalah harapan dan tujuan keberhasilan pada masa yang akan datang, beraspirasibercita-cita, berkeinginan, berhasrat serta keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, seperti keberhasilan dalam tujuan keinginan tersebut. Aspirasi dalam bahasa Inggris 'aspiration' berarti cita-cita. Aspiration menurut Katadasarnya, aspire berarti cita-cita atau juga berkeinginan Echols (1983:41). Sedangkan menurut Poerwadarminta (1976) aspirasi adalah gairah (keinginan atau harapan yang keras).

Jadi aspirasi masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat baik berupa keterlibatan langsung maupun berupa sejumlah gagasan verbal dari lapisan masyarakat manapun sehingga mempengaruhi dan mendukung dalam proses pembangunan. Prinsip dasar dalam melibatkan masyarakat secara langsung adalah bahwa apa yang disebut dengan melibatkan kepentingan rakyat hanya akan terjadi jika masyarakat itu sendiri yang ambil bagian. Dengan adanya keterlibatan rakyat itu sendiri maka dengan sendirinya pula akan menjadi penjamin bagi suatu proses baik dan Bener (Bank Dunia dalam Salman 2005:3). Abe dalam Salman (2009:22), beranggapan dengan melibatkan masyarakat maka secara langsung akan membawa tiga dampak penting yaitu :

- a) Terhindar dari peluang terjadinya manipulasi. Karena dengan terlibatnya masyarakat maka akan memperjelas apa yang sebetulnya terjadi di masyarakat.
- b) Memberikan nilai tambah dalam hal legitimasi rumusan perencanaan. Karena semakin banyak masyarakat yang terlibat, maka akan semakin baik.
- c) Dan juga dapat meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik di masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah baik dalam proses pembuatan keputusan, sampai pada tahap pengawasan telah diatur dalam undang – undang. Misalnya Undang – Undang No. 10 Tahun 2004 tentang keterbukaan. Dalam Pasal 5 yang disebutkan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan dalam proses pembuatan kebijakan, mulai dari tahap perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan. Selain itu Pasal 53 juga disebutkan bahwa masyarakat berhak memberi masukan secara lisan atau tertulis dalam proses pembuatan kebijakan. Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 juga disebutkan tujuan dari otonomi daerah adalah meningkatkan peran serta masyarakat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Serta kewajiban anggota DPRD dalam Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 untuk menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti serta memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Begitupun dengan yang terjadi di Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir. Desa Batu Ampar merupakan desa berkembang yang tentu saja memiliki banyak keperluan fasilitas umum bagi semua masyarakat maka dengan demikian pemerintah desa bersama BPD diharuskan untuk membuat rancangan pembangunan yang baik. Rancangan pembangunan yang baik harus dilakukan dengan melakukan musyawarah dengan pendapat dengan masyarakat. Tidak hanya persoalan pembangunan tujuan pembentukan pemerintahan Desa tentu saja untuk membuat masyarakat hidup aman dan sejahtera maka kesejahteraan tersebut merupakan tanggung jawab pemerintahan desa.

Untuk memperbaiki kekurangan dalam mendengar dan memungut aspirasi masyarakat di desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning maka perlu dilakukan evaluasi dan untuk melakukan evaluasi didalam penelitian ini menggunakan teori oleh William N.

Dunn. Mengenai Teori Evaluasi yang dikemukakan oleh William N Dunn mempunyai lima indikator yaitu sebagai berikut (Subarsono, 2013:126):

**a) Efektifitas**

Efektifitas merupakan suatu tolak ukur yang digunakan untuk melihat apakah suatu kebijakan yang telah dilakukan sudah mencapai tujuan yang diinginkan dan apakah kebijakan yang diambil tersebut telah tepat sasaran dan masalah yang ada ditengah-tengah masyarakat dapat di selesaikan dengan baik. Menurut William N Dunn mengatakan bahwa ada beberapa kriteria yang diperlukan untuk memenuhi proses evaluasi kebijakan publik adapun pendapat William N Dunn adalah Efektifitas ini berkaitan dengan suatu hasil apakah suatu alternatif kegiatan yang dilakukan itu sudah mencapai hasil yang di targetkan atau setidaknya telah mencapai tujuan dari kegiatan tersebut dibuat. Pengukuran dari tingkat efektifitas ini biasanya menggunakan unit produk ataupun nilai dari suatu produk tersebut dimata orang lain (Dunn. 2003).

Berdasarkan defenisi efektifitas yang disampaikan oleh William N Dunn dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu penilaian yang dilakukan terhadap suatu tindakan yang di ambil apakah hasil dari tindakan tersebut telah mencapai tujuan yang kita inginkan dan kita tetapkan dalam suatu kegiatan tersebut.

Sedangkan menurut pendapat efendi efektifitas merupakan suatu pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan tepat sesuai anggaran, Waktu yang telah ditetapkan serta jumlah personil yang ditentukan. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efektifitas menurut efendi adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan anggaran, waktu dan personil yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan indikator efektifitas ada tiga sub indikator yang digunakan untuk mendapatkan hasil didalam penelitian ini adapun sub indikator tersebut sebagai berikut :

**1 Menentukan Tema Rapat dengan masyarakat**

Dalam sub indikator menentukan Tema Rapat dengan Masyarakat penulis melakukan wawancara dengan pihak informan dan key informan yang bertujuan untuk mengetahui apa saja yang dilakukan dan di persiapkan serta mengetahui bagaimana proses menentukan tema rapat serta melihat apa yang harus di evaluasi dalam menentukan tema rapat tersebut.

Selain wawancara penulis juga melakukan observasi dilokasi penelitian dan pada observasi yang dilakukan penulis melihat bahwa untuk menentukan tema rapat adalah sebagai berikut: Tema rapat ditentukan sesuai dengan apa yang di perlukan oleh masyarakat dan hal yang sangat perlu dibahas ialah tentang rencana pembangunan karena persoalan pembangunan tentunya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan desa serta permasalahan pembangunan juga merupakan permasalahan yang berhubungan dengan penggunaan dana desa jadihal tersebut harus di jelaskan secara rinci agar pengelolaan dana desa memiliki transparansi.

Berdasarkan fakta yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan serta melihat semua tahapan dalam proses penelitian penulis maka untuk menentukan tema rapat penulis membuat sebuah analisa bahwa: Musyawarah yang dilakukan di Desa Batu Ampar merupakan musyawarah yang bertujuan untuk mendengarkan pendapat masyarakat salah satu hal yang paling penting untuk meminta dan mendengar pendapat masyarakat adalah tentang rencana pembangunan di Desa Batu Ampar maka dengan demikian tema rapat yang cocok untuk dilaksanakan ialah dengan teman MUSREMBANG yang memiliki arti rapar musyawarah yang membahas tentang rancangan pembangunan desa. Rencana pembangunan karena persoalan pembangunan tentunya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan

desa serta permasalahan pembangunan juga merupakan permasalahan yang berhubungan dengan penggunaan dana desa jadi hal tersebut harus di jelaskan secara rinci agar pengelolaan dana desa memiliki transparansi. Sementara itu untuk melakukan rapat dengan tema lainnya memang belum pernah dilakukan maka hal yang harus dievaluasi dalam menentukan tema rapat ini ialah harus dilakukan beberapa musyawarah lain yang bertujuan untuk mendapatkan aspirasi masyarakat seperti contohnya tentang Peraturan Desa yang dibutuhkan agar kehidupan masyarakat desa lebih aman dan nyaman serta terciptanya lingkungan yang sehat.

## **2 Mengadakan rapat mendengarkan aspirasi masyarakat**

Dalam sub indikator Mengadakan rapat mendengarkan aspirasi masyarakat penulis melakukan wawancara dengan pihak informan dan key informan yang bertujuan untuk mengetahui apa saja yang dilakukan dan di persiapkan serta mengetahui bagaimana proses menentukan tema rapat serta melihat apa yang harus di evaluasi dalam menentukan tema rapat tersebut.

Selain wawancara penulis juga melakukan observasi dilokasi penelitian dan pada observasi yang dilakukan penulis melihat bahwa untuk Mengadakan rapat mendengarkan aspirasi masyarakat adalah sebagai berikut: Pelaksanaan rapat hanya dilakukan dua kali selama priode pemerintahan BPD ini. Didalam satu tahunnya biasanya rapat tersebut diadakan pada awal tahun dan pertengahan tahun berjalan dimana pada awal tahun membahas tentang rencana dan pada pertengahan tahun membahas tentang evaluasi dalam pelaksanaan hal yang sudah direncanakan sebelumnya contohnya seperti perencanaan pembangunan maka pada pertengahan tahun akan diadakan rapat untuk melihat dan melaporkan sejauhmana perkembangan pembangunan tersebut dan hal-hal apa yang harus dilakukan evaluasi karena tentusaja ada hal-hal yang terjadi diluar dari keinginan dan rencana yang sudah dibuat bersama.

Berdasarkan fakta yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan serta melihat semua tahapan dalam proses penelitian penulis maka untuk Mengadakan rapat mendengarkan aspirasi masyarakat penulis membuat sebuah analisa bahwa: Rapat yang berhubungan dengan mengambil aspirasi masyarakat dilakukan sebanyak dua kali didalam satu tahunnya biasanya rapat tersebut diadakan pada awal tahun dan pertengahan tahun berjalan dimana pada awal tahun membahas tentang rencana dan pada pertengahan tahun membahas tentang evaluasi dalam pelaksanaan hal yang sudah direncanakan sebelumnya contohnya seperti perencanaan pembangunan maka pada pertengahan tahun akan diadakan rapat untuk melihat dan melaporkan sejauhmana perkembangan pembangunan tersebut dan hal-hal apa yang harus dilakukan evaluasi karena tentusaja ada hal-hal yang terjadi diluar dari keinginan dan rencana yang sudah dibuat bersama. Namun untuk hal lainnya yang juga tak kalah penting mendengarkan aspirasi masyarakat tidak pernah dilakukan seperti meminta pendapat masyarakat tentang PERDES yang diperlukan atau meminta pendapat masyarakat tentang pelaksanaan pemerintah desa oleh Kepala desa maka dengan demikian di harapkan untuk dapat melaksanakan musyawarah dengan teman pembentukan perdes serta kritik dan saran masyarakat terkait pelaksanaan pemerintahan desa agar dapat memberikan masukan yang membangun dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

## **3 Mencatat semua aspirasi masyarakat**

Dalam sub indikator mencatat semua aspirasi masyarakat dengan Masyarakat penulis melakukan wawancara dengan pihak informan dan key informan yang bertujuan untuk mengetahui apa saja yang dilakukan dan di persiapkan serta mengetahui bagaimana proses menentukan tema rapat serta melihat apa yang harus di evaluasi dalam menentukan tema rapat tersebut.

Selain wawancara penulis juga melakukan observasi dilokasi penelitian dan pada observasi yang dilakukan penulis melihat bahwa untuk mencatat semua aspirasi masyarakat adalah sebagai berikut: Dalam pelaksanaan musrembang aspirasi yang disampaikan masyarakat dicatat dengan baik dan dibuat dalam suatu laporan hasil rapat dan selanjutnya akan dijadikan acuan untuk menarik kesimpulan dari apa yang diinginkan dan di harapkan oleh masyarakat.

Berdasarkan fakta yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan serta melihat semua tahapan dalam proses penelitian penulis maka untuk mencatat semua aspirasi masyarakat penulis membuat sebuah analisa bahwa: Menyampaikan aspirasi atau keinginan dalam pelaksanaan musrembang merupakan hak seluruh masyarakat yang menghadiri musrembang tersebut selanjutnya aspirasi yang disampaikan masyarakat dicatat dengan baik dan dibuat dalam suatu laporan hasil rapat dan selanjutnya akan dijadikan acuan untuk menarik kesimpulan dari apa yang diinginkan dan di harapkan oleh masyarakat

#### **b) Efisiensi**

Efisiensi ini adalah tolak ukur untuk melihat apakah efektivitas yang telah dinilai sebelumnya sudah efektif atau belum. Efisiensi berhubungan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk mencapai tingkat efisiensi tersebut. Efisiensi itu sendiri merupakan hubungan antara tingkat efektifitas dengan usaha yang digunakan. Efisiensi itu merupakan sumber daya yang digunakan untuk menghitung suatu keberhasilan dan efektifitas tertinggi. Efisiensi ini biasanya dihitung dengan menggunakan perhitungan keberhasilan perunit hasil dari suatu kegiatan yang dilakukan (Dunn, 2003).

Dari pengertian yang disampaikan oleh William N Dunn. Dapat disimpulkan bahwa defenisi dari efisiensi adalah jumlah besaran usaha yang dilakukan untuk mencapai efektifitas. Hubungan antara Efisiensi dengan Efektifitas adalah melihar efektifitas berdasarkan jumlah usaha yang digunakan untuk mencapai efisiensi tersebut serta berapa banya sumber daya yang digunakan untuk mencapai dari sebuah efektifitas.

Selain Willian M Dunn Malayu SP Hasibuan juga memiliki pendapat tentang apa itu Efisiensi menurutnya adalah perbandingan antara usaha yang dilakukan dengan hasil yang didapat. Atau juga dapat dilihat besaran sumber daya yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang optimal yang pada dasarnya hasil harus lebih besar dari pada sumber daya yang digunakan (Hasibuan, 1994).

Berdasarkan indikator efisiensi ada tiga sub indikator yang digunakan untuk mendapatkan hasil didalam penelitian ini adapun sub indikator tersebut sebagai berikut :

#### **1 Semua masyarakat mengikuti rapat**

Dalam sub indikator Semua masyarakat mengikuti rapat dengan Masyarakat penulis melakukan wawancara dengan pihak informan dan key informan yang bertujuan untuk mengetahui apa saja yang dilakukan dan di persiapkan serta mengetahui bagaimana proses menentukan tema rapat serta melihat apa yang harus di evaluasi dalam menentukan tema rapat tersebut.

Selain wawancara penulis juga melakukan observasi dilokasi penelitian dan pada observasi yang dilakukan penulis melihat bahwa untuk Semua masyarakat mengikuti rapat adalah sebagai berikut: Pelaksanaan rapat musrembang mengundang seluruh masyarakat tapi tentu saja ada beberapa masyarakat yang tidak hadir serta lokasi diadakan rapat tersebut juga tidak cukup atau belum mampu menampung semua lapisan masyarakat tetapi walaupun dengan demikian perwakilan masyarakat dan beberapa tokoh masyarakat cukup untuk mewakili menyampaikan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan fakta yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan serta melihat semua tahapan dalam proses penelitian penulis maka untuk Semua

masyarakat mengikuti rapat penulis membuat sebuah analisa bahwa: Pelaksanaan rapat musrem mengundang seluruh masyarakat tapi tentu saja ada beberapa masyarakat yang tidak hadir serta lokasi diadakan rapat tersebut juga tidak cukup atau belum mampu menampung semua lapisan masyarakat tetapi walaupun dengan demikian perwakilan masyarakat dan beberapa tokoh masyarakat seperti RT, RW, Babinsa, Bhabinkantibmas serta organisasi masyarakat seperti Pemuda Pancasila, LAM dan lain sebagainya dianggap cukup untuk mewakili menyampaikan aspirasi masyarakat.

## 2 Semua masyarakat menyampaikan pendapat

Dalam sub indikator Semua masyarakat menyampaikan pendapat penulis melakukan wawancara dengan pihak informan dan key informan yang bertujuan untuk mengetahui apa saja yang dilakukan dan di persiapkan serta mengetahui bagaimana proses menentukan tema rapat serta melihat apa yang harus di evaluasi dalam menentukan tema rapat tersebut.

Selain wawancara penulis juga melakukan observasi dilokasi penelitian dan pada observasi yang dilakukan penulis melihat bahwa untuk Semua masyarakat menyampaikan pendapat adalah sebagai berikut: Pelaksanaan rapat musrembang mengundang seluruh masyarakat belum semuanya yang mengeluarkan suara banyak yang datang hanya menonton dan ada juga yang tidak berani menyampaikan pendapat dimuka umum dan hanya beradi berbicara dibalik temannya dan seorang perwakilan yang akan menyampaikan kepada pihak pemerintah desa atau BPD desa Batu Ampar.

Berdasarkan fakta yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan serta melihat semua tahapan dalam proses penelitian penulis maka untuk Semua masyarakat menyampaikan pendapat membuat sebuah analisa bahwa: Pelaksanaan rapat musrembang yang diadakan sebagai ajang menjemput dan mendengarkan aspirasi masyarakat yang telah mengundang seluruh masyarakat namun belum semuanya yang hadir dan belum semua masyarakat berani untuk mengeluarkan suara banyak yang datang hanya untuk menonton atau menyampaikan pendapat hanya beradi berbicara dibalik temannya dan seorang perwakilan yang akan menyampaikan kepada pihak pemerintah desa atau BPD desa Batu Ampar berlangsungnya acara sehingga diskusi menjadi kurang hidup dan pengambilan keputusan hanya menggunakan beberapa masukan dari orang yang itu itu saja.

### c) Kecukupan

Kecukupan ini merupakan suatu indikator yang digunakan untuk menghitung jumlah dari suatu efektifitas yang telah dilihat sebelumnya yaitu mengenai kecukupan nilai, pemuasan kebutuhan, serta adanya kemungkinan tumbuhnya masalah baru atas dasar kurangnya kecukupan tersebut. Kriteria yang digunakan untuk melakukan sebuah evaluasi kebijakan publik kecukupan memiliki maksud ialah suatu tingkat dari efektifitas yang dimiliki oleh suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan kepuasan, nilai yang baik atau seberapa besar masalah yang timbul akibat dari perbuatan itu dilaksanakan. Kecukupan yang dimaksud disini adalah kinerja apakah kinerja yang dimiliki pegawai sebanding dengan apa yang dibutuhkan untuk mencapai target dari tujuan yang telah di tetapkan (Dunn, 2003).

Pengertian dari kecukupan yang disampaikan oleh Budi Winarno adalah kecukupan yang dirasakan telah mencukupi berbagai hal yang diperlukan oleh semua pihak. Kecukupan ini berubungan dengan berapa besar jumlah efektifitas yang dapat memenuhi kebutuhan, nilai serta kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan ini digunakan untuk bagaimana cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah apakah sudah efektif dan efisien atau tidak (Winarno, 2002).

Berdasarkan indikator kecukupan ada dua sub indikator yang digunakan untuk mendapatkan hasil didalam penelitian ini adapun sub indikator tersebut sebagai berikut :

#### **Masyarakat puas karena pendapatnya didengarkan**

Dalam sub indikator masyarakat puas karena pendapatnya didengarkan penulis melakukan wawancara dengan pihak informan dan key informan yang bertujuan untuk mengetahui apa saja yang dilakukan dan di persiapkan serta mengetahui bagaimana proses menentukan tema rapat serta melihat apa yang harus di evaluasi dalam menentukan tema rapat tersebut.

Selain wawancara penulis juga melakukan observasi dilokasi penelitian dan pada observasi yang dilakukan penulis melihat bahwa untuk menentukan tema rapat adalah sebagai berikut: Dikarenakan keputusan yang diambil melalui hasil rapat yang dikemukakan oleh setiap peserta rapat jadi masyarakat seharusnya merasa senang dengan keputusan yang diambil walaupun masih terdapat beberapa yang berbeda pendapat namun pada akhirnya ikut menerima segala keputusan yang dibuat dalam rapat tersebut.

Berdasarkan fakta yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan serta melihat semua tahapan dalam proses penelitian penulis maka untuk menentukan tema rapat penulis membuat sebuah analisa bahwa: Dikarenakan keputusan yang diambil melalui hasil rapat yang dikemukakan oleh setiap peserta rapat jadi masyarakat seharusnya merasa senang dengan keputusan yang diambil walaupun masih terdapat beberapa yang berbeda pendapat namun pada akhirnya ikut menerima segala keputusan yang dibuat dalam rapat tersebut. Jika ada perbedaan pendapat harusnya di diskusikan pada saat rapat dan rapat belum dapat mengambil sebuah kesimpulan jika belum ada kesepakatan bersama.

#### **d) Pemerataan**

Pemerataan disini maksudnya apakah suatu kebijakan dan pembagian yang dilakukan dalam mengambil suatu kebijakan tersebut apakah sudah merata atau masih ada yang belum tercover secara keseluruhan. Pemerataan memiliki hubungan yang erat dengan rasionalitas yang legal, kehidupan sosial serta menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok masyarakat yang hidup dalam suatu daerah (Dunn, 2003).

Dapat disimpulkan dari definisi di atas bahwa pemerataan memiliki hubungan yang erat dengan rasionalitas yang legal, kehidupan sosial serta menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok masyarakat yang hidup dalam suatu daerah. Yang termasuk kedalam pemerataan atau kesamaan tersebut adalah suatu akuntabilitas. Akuntabilitas ini merupakan apakah perbuatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku.

Budi Winarno juga memberikan pengertian tentang apa itu yang dimaksud dengan kesamaan yaitu memiliki arti keadilan bagi seluruh masyarakat atau seluruh pihak yang terlibat. Kesamaan ini memiliki hubungan yang erat dengan akuntabilitas yang dimiliki oleh setiap pekerja (Winarno, 2002).

Berdasarkan indikator pemerataan ada sub indikator yang digunakan untuk mendapatkan hasil didalam penelitian ini adapun sub indikator tersebut sebagai berikut :

#### **Pengambilan kebijakan dilakukan berdasarkan aspirasi yang disampaikan masyarakat**

Dalam sub indikator Pengambilan kebijakan dilakukan berdasarkan aspirasi yang disampaikan masyarakat penulis melakukan wawancara dengan pihak informan dan key informan yang bertujuan untuk mengetahui apa saja yang dilakukan dan di persiapkan

serta mengetahui bagaimana proses menentukan tema rapat serta melihat apa yang harus di evaluasi dalam menentukan tema rapat tersebut.

Selain wawancara penulis juga melakukan observasi dilokasi penelitian dan pada observasi yang dilakukan penulis melihat bahwa untuk Pengambilan kebijakan dilakukan berdasarkan aspirasi yang disampaikan masyarakat adalah sebagai berikut:

Proses tata cara mendengarkan aspirasi masyarakat melalui MUSDUS (Musyawarah Dusun) menampung aspirasi masyarakat, baik bidang pembangunan Infrastruktur, pemberdayaan masyarakat,dll dipimpin seorang Kepala Dusun wilayah masing-masing, melibatkan tokoh masyarakat, Tokoh Agama,Tokoh Adat BPD,LPM,RT,RW,Pemuda

Berdasarkan fakta yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan serta melihat semua tahapan dalam proses penelitian penulis maka untuk Pengambilan kebijakan dilakukan berdasarkan aspirasi yang disampaikan masyarakat penulis membuat sebuah analisa bahwa: Proses tata cara mendengarkan aspirasi masyarakat melalui MUSDUS (Musyawarah Dusun) menampung aspirasi masyarakat, baik bidang pembangunan Infrastruktur, pemberdayaan masyarakat,dll dipimpin seorang Kepala Dusun wilayah masing-masing, melibatkan tokoh masyarakat, Tokoh Agama,Tokoh Adat BPD,LPM,RT,RW,Pemuda.Aspirasi tersebut dibuat dalam berita acara MUSDUS dibahas bersama TIM RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) unkl di dibahas Dalam MUDES (Musyawarah Desa) Tahunan yang dipimpin oleh BPD.sebelum beberapa usulan tersebut Disahkan Oleh Kepala Desa dalam Sebuah Dokumen Perencanaan yaitu Perdes RKPDes.

#### e) Responsivitas

Responsivitas ini adalah untuk melihat seberapa besar kepuasan masyarakat terhadap kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah atau suatu kelompok yang memiliki tujuan tertentu terhadap suatu kegiatan yang dilakukan. Responsivitas ini memiliki merupakan hubungan antara kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat (Dunn, 2003).

Berdasarkan keterangan dari William N Dunn Responsivitas disimpulkan sebagai seberapa besar kebijakan dapat menyelesaikan masalah yang telah terjadi, preferensi, atau nilai-nilai yang terkandung untuk mengenal kebutuhan yang dimiliki oleh masyarakat, mengatur kegiatan, atau mengembangkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan yang dimiliki oleh masyarakat.

Sementara itu Budi Winarno memberikan penjelasan tentang Responsivitas adalah respon dari suatu aktifitas yang dilaksanakan. Maksudnya adalah suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dibandingkan dengan respon yang diberikan oleh masyarakat terhadap kegiatan tersebut. Responsivitas ini berhubungan dengan seberapa jauh hubungan yang dimiliki oleh kebijakan dan kepuasan yang berupa nilai, kebutuhan, preferensi atau nilai yang diberikan masyarakat kelompok tertentu. Yang mana keberhasilan tersebut dapat dinilai dari pengaruh dari kebijakan yang diambil serta bagaimana tanggapan masyarakat setelah dampak dari kebijakan tersebut apakah berbentuk dukungan ataupun penolakan (Winarno, 2002).

Berdasarkan indikator responsivitas ada sub indikator yang digunakan untuk mendapatkan hasil didalam penelitian ini adapun sub indikator tersebut sebagai berikut :

#### **Kepuasan Masyarakat setelah pendapatnya didengar dan disalurkan oleh pemerintahan Desa**

Dalam sub indikator Kepuasan Masyarakat setelah pendapatnya didengardan disalurkan oleh pemerintahan Desa penulis melakukan wawancara dengan pihak informan dan key informan yang bertujuan untuk mengetahui apa saja yang dilakukan dan di

persiapkan serta mengetahui bagaimana proses menentukan tema rapat serta melihat apa yang harus di evaluasi dalam menentukan tema rapat tersebut.

Selain wawancara penulis juga melakukan observasi dilokasi penelitian dan pada observasi yang dilakukan penulis melihat bahwa untuk Kepuasan Masyarakat setelah pendapatnya didengardan disalurkan oleh pemerintahan Desa adalah sebagai berikut: Dari lokasi penelitianpenulismelihat bahwamasyarakat sangat mendukung dan sangat puas akan keputusana atau rencana yang dibuat bersama serta penulis juga melihat hal yang direncanakan sudah direalisasikan satu persatu,

Berdasarkan fakta yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan serta melihat semua tahapan dalam proses penelitian penulis maka untuk Kepuasan Masyarakat setelah pendapatnya didengardan disalurkan oleh pemerintahan Desa penulis membuat sebuah analisa bahwa: Kepuasan Masyarakat setelah pendapatnya didengardan disalurkan oleh pemerintahan Desa adalah sebagai bahwa masyarakat sangat mendukung dan sangat puas akan keputusana atau rencana yang dibuat bersama serta penulis juga melihat hal yang direncanakan sudah direalisasikan satu persatu. Salah satu contohnya adalah pembangunan fasilitas umum desa sepeti lapangan sepakbola, perbaikan aula desa serta berbagai macam pembangunan lainnya. Ini dapat menjadi bukti bahwa aspirasi masyarakat didengar dan di realisasikan sehingga dapat menjadi salah satu alasan kepuasan masyarakat akan sistem pemerintahan di Desa Batu Ampar.

#### **f) Ketepatan**

Ketepatan ini akan berorientasi kepada apakah suatu kebijakan yang di ambil telah tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Ketepatan ini merupakan suatu sasaran yang akan dituju oleh suatu program yang dilakukan oleh kantor desa. siapa saja yang mendapatkan bantuan dan siapa saja yang berhak mendapatkan surat keterangan usaha. Maka untuk pendapat masyarakat dan pendapat kantor desa terkait hal tersebut dapat dilihat melalui wawancara.

Ketepatan merupakan suatu hasil yang berhubungan dengan rasionalitas substantif yang merujuk kepada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan kebijakan tersebut.

Berdasarkan indikator efektifitas ada dua sub indikator yang digunakan untuk mendapatkan hasil didalam penelitian ini adapun sub indikator tersebut sebagai berikut :

#### **Aspirasi yang disampaikan masyarakat mampu membangun kesejahteraan desa**

Dalam sub indikator Apirasi yang disampaikan masyarakat mampu membangun kesejahteraan desa penulis melakukan wawancara dengan pihak informan dan key informan yang bertujuan untuk mengetahui apa saja yang dilakukan dan di persiapkan serta mengetahui bagaimana proses menentukan tema rapat serta melihat apa yang harus di evaluasi dalam menentukan tema rapat tersebut.

Selain wawancara penulis juga melakukan observasi dilokasi penelitian dan pada observasi yang dilakukan penulis melihat bahwa untuk Apirasi yang disampaikan masyarakat mampu membangun kesejahteraan desa adalah sebagai berikut: Aspirasi yang disampaikan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat seperti adanya BUMDes Desa Batu Ampar itu merupakan salah satu contoh koperasi desa atau usaha desa yang dibuat berdasarkan keinginan dari masyarakat maka dengan adanya BUMDes diharapkan memberikan program yang mampu membantu perkembangan perekonomian masyarakat desa.

Berdasarkan fakta yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan serta melihat semua tahapan dalam proses penelitian penulis maka untuk Apirasi yang disampaikan masyarakat mampu membangun kesejahteraan desa penulis

membuat sebuah analisa bahwa: Hal-hal yang dikemukakan masyarakat tentunya merupakan sebuah bentuk keinginan harapan serta apa yang di perlukan oleh masyarakat desa maka dengan demikian jika aspirasi tertampung dengan baik maka sudah dapat dipastikan bahwa aspirasi tersebut memang membangun kesejahteraan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat seperti adanya BUMDes Desa Batu Ampar itu merupakan salah satu contoh koperasi desa atau usaha desa yang dibuat berdasarkan keinginan dari masyarakat maka dengan adanya BUMDes diharapkan memberikan program yang mampu membantu perkembangan perekonomian masyarakat desa.

Pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung aspirasi masyarakat di Desa Batu Ampar dilaksanakan melalui musyawarah perancangan pembangunan atau yang dikenal dengan MUSREMBANG selain itu tidak ada kegiatan atau aksi nyata lainnya yang dilakukan oleh pihak BPD, terkecuali jika ada laporan yang langsung disampaikan oleh masyarakat barulah pihak BPD mencatat laporan tersebut padahal seharusnya BPD lebih aktif dan lebih kreatif dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang mana keinginan masyarakat merupakan kebutuhan masyarakat maka jika aspirasi tersebut di dengar akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan ekonomi, sosial dan budaya di desa. Maka hal-hal yang harus dievaluasi ialah BPD harus lebih aktif dalam menjemput mendengar dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan tujuan mendengarkan aspirasi masyarakat untuk kemajuan desa.

Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa tentu saja terdapat beberapa kendala pelaksanaan evaluasi tersebut penulis melakukan wawancara dengan pihak informan dan key informan yang bertujuan untuk mengetahui apa saja yang dilakukan dan di persiapkan serta mengetahui bagaimana proses menentukan tema rapat serta melihat apa yang harus di evaluasi dalam menentukan tema rapat tersebut.

Berdasarkan fakta yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan serta melihat semua tahapan dalam proses penelitian penulis maka untuk hambatan dalam pelaksanaan tugas BPD untuk menampung aspirasi masyarakat penulis membuat sebuah analisa bahwa: Jika melihat kendala atau hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan pemungutan aspirasi masyarakat adalah kurangnya wadah atau tempat untuk menampung aspirasi masyarakat, kurangnya inovasi yang dilakukan BPD dalam menjemput aspirasi masyarakat, kurangnya dana untuk melaksanakan musyawarah, kurangnya partisipasi masyarakat untuk turut hadir dalam musyawarah yang dilaksanakan, kurangnya minat masyarakat untuk memberikan pendapat dalam musyawarah sehingga mengakibatkan aspirasi tidak tersalurkan dengan baik, serta banyaknya keinginan masyarakat yang belum bisa diwujudkan karena terkendala waktu dan biaya tersebut.

## SIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Efektivitas Musyawarah yang dilakukan di Desa Batu Ampar merupakan musyawarah yang bertujuan untuk mendengarkan pendapat masyarakat salah satu hal yang paling penting untuk meminta dan mendengar pendapat masyarakat adalah tentang rencana pembangunan di Desa Batu Ampar maka dengan demikian tema rapat yang cocok untuk dilaksanakan ialah dengan tema MUSREMBANG yang memiliki arti rapat musyawarah yang membahas tentang rancangan pembangunan desa. Sementara itu untuk melakukan rapat dengan tema lainnya memang belum pernah dilakukan maka hal yang harus dievaluasi dalam menentukan tema rapat ini ialah harus dilakukan beberapa musyawarah lain yang bertujuan untuk mendapatkan

aspirasi masyarakat seperti contohnya tentang Peraturan Desa yang dibutuhkan agar kehidupan masyarakat desa lebih aman dan nyaman serta terciptanya lingkungan yang sehat. Rapat yang berhubungan dengan mengambil aspirasi masyarakat dilakukan sebanyak dua kali didalam satu tahunnya. Namun untuk hal lainnya yang juga tak kalah penting mendengarkan aspirasi masyarakat tidak pernah dilakukan seperti meminta pendapat masyarakat tentang PERDES yang diperlukan atau meminta pendapat masyarakat tentang pelaksanaan pemerintah desa oleh Kepala desa maka dengan demikian di harapkan untuk dapat melaksanakan musyawarah dengan teman pembentukan perdes serta kritik dan saran masyarakat terkait pelaksanaan pemerintahan desa agar dapat memberikan masukan yang membangun dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

- 2 Efisiensi Pelaksanaan rapat musrembang mengundang seluruh masyarakat tapi tentu saja ada beberapa masyarakat yang tidak hadir serta lokasi diadakan rapat tersebut juga tidak cukup atau belum mampu menampung semua lapisan masyarakat tetapi walaupun dengan demikian perwakilan masyarakat dan beberapa tokoh masyarakat seperti RT, RW, Babinsa, Bhabinkantibmas serta organisasi masyarakat seperti Pemuda Pancasila, LAM dan lain sebagainya dianggap cukup untuk mewakili menyampaikan aspirasi masyarakat. Pelaksanaan rapat musrembang yang diadakan sebagai ajang menjemput dan mendengarkan aspirasi masyarakat yang telah mengundang seluruh masyarakat namun belum semuanya yang hadir dan belum semua masyarakat berani untuk mengeluarkan suara banyak yang datang hanya untuk menonton atau menyampaikan pendapat hanya beradi berbicara dibalik temannya dan seorang perwakilan yang akan menyampaikan kepada pihak pemerintah desa atau BPD desa Batu Ampar berlangsungnya acara sehingga diskusi menjadi kurang hidup dan pengambilan keputusan hanya menggunakan beberapa masukan dari orang yang itu itu saja.
- 3 Kecukupan dalam pelaksanaan musyawarah tersebut dapat dilihat melalui keputusan yang diambil melalui hasil rapat yang dikemukakan oleh setiap peserta rapat jadi masyarakat seharusnya merasa senang dengan keputusan yang diambil walaupun masih terdapat beberapa yang berbeda pendapat namun pada akhirnya ikut menerima segala keputusan yang dibuat dalam rapat tersebut. Jika ada perbedaan pendapat harusnya di diskusikan pada saat rapat dan rapat belum dapat mengambil sebuah kesimpulan jika belum ada kesepakatan bersama.
- 4 Pemerataan dalam Proses tata cara mendengarkan aspirasi masyarakat melalui MUSDUS (Musyawarah Dusun) menampung aspirasi masyarakat, baik bidang pembangunan Infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dll dipimpin seorang Kepala Dusun wilayah masing-masing, melibatkan tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat BPD, LPM, RT, RW, Pemuda. Aspirasi tersebut dibuat dalam berita acara MUSDUS dibahas bersama TIM RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) untk di dibahas Dalam MUDES (Musyawarah Desa) Tahunan yang dipimpin oleh BPD. sebelum beberapa usulan tersebut Disahkan Oleh Kepala Desa dalam Sebuah Dokumen Perencanaan yaitu Perdes RKPDes.
- 5 Responsivitas ataupun Kepuasan Masyarakat setelah pendapatnya didengardan disalurkan oleh pemerintahan Desa adalah sebagai bahwa masyarakat sangat mendukung dan sangat puas akan keputusan atau rencana yang dibuat bersama serta penulis juga melihat hal yang direncanakan sudah direalisasikan satu persatu. Salah satu contohnya adalah pembangunan fasilitas umum desa seperti lapangan sepakbola, perbaikan aula desa serta berbagai macam pembangunan lainnya. Ini dapat menjadi bukti bahwa aspirasi masyarakat didengar dan di realisasikan sehingga dapat menjadi salah satu alasan kepuasan masyarakat akan sistem pemerintahan di Desa Batu Ampar.

- 6 Ketepatan hal-hal yang dikemukakan masyarakat tentunya merupakan sebuah bentuk keinginan harapan serta apa yang di perlukan oleh masyarakat desa maka dengan demikian jika aspirasi tertampung dengan baik maka sudah dapat dipastikan bahwa aspirasi tersebut memang membangun kesejahteraan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat seperti adanya BUMDes Desa Batu Ampar itu merupakan salah satu contoh koperasi desa atau usaha desa yang dibuat berdasarkan keinginan dari masyarakat maka dengan adanya BUMDes diharapkan memberikan program yang mampu membantu perkembangan perekonomian masyarakat desa.
- 7 Kendalam atau hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan pemungutan aspirasi masyarakat adalah sebagai berikut:
  - a. Kurangnya wadah atau tempat untuk menampung aspirasi masyarakat, kurangnya inovasi yang dilakukan BPD dalam menjemput aspirasi Masyarakat;
  - b. Kurangnya dana untuk melaksanakan musyawarah, kurangnya partisipasi masyarakat untuk turut hadir dalam musyawarah yang dilaksanakan;
  - c. Kurangnya minat masyarakat untuk memberikan pendapat dalam musyawarah sehingga mengakibatkan aspirasi tidak tersalurkan dengan baik;
  - d. Serta banyaknya keinginan masyarakat yang belum bisa diwujudkan karena terkendala waktu dan biaya tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Kalitaturf Ilmu Politik*. Jakarta: Kencana.
- Arifin, Z. (2014). *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Badrudin. (2015). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Brathakusuma. (2002). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, B. (2013). *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prada Media Grup.
- Efendi, K. (2010). *Penguatan Pemerintah Desa*. Bandung: Indrapaharsita.
- Hafis, R. I. (2015). *Teori Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publisher.
- Hamzah, U. (2012). *Teori Kinerja dan Pengukurannya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herdiansa. (2013). *Wawancara Observasi dan Fokus Group: Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*. Jakarta: Raja Wali Press.
- Moleong, L. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda.
- Nawawi, H. (2011). *Metode Penelitian di Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Ndraha, T. (2011). *Kybernologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rauf, R., & Maulida, S. (2015). *Pemerintah Desa*. Pekanbaru: Zanafa.
- Rusby, & Zulkifli. (2017). *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Subarsono. (2013). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah mada Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syafi'i. (2002). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wasistono. (2006). *Proses Pembangunan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.